

INTEGRITAS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DALAM SEKTOR PUBLIK: STUDI KASUS DAN PELAJARAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Lia Muliawaty¹, Ajam Mustajam², Mas Adi Komar³

^{1,2,3}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: lia.muliawaty@unpas.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi konsep integritas dan pengambilan keputusan etis dalam sektor publik, dengan fokus pada studi kasus dari pemerintahan lokal di Indonesia. Melalui analisis kualitatif terhadap beberapa kasus pilihan, artikel ini mengidentifikasi bagaimana integritas dan etika diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan lokal. Penelitian ini mengungkapkan tantangan dan hambatan yang dihadapi pejabat publik dalam menjaga integritas dan mengambil keputusan etis, serta strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kerja kebijakan yang mendukung, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi praktik etis di lapangan. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan, termasuk pengembangan pelatihan etika, peningkatan mekanisme pengawasan, dan penguatan budaya organisasi yang berfokus pada etika. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang tertarik dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan etis.

Kata Kunci: Integritas Sektor Publik, Pengambilan Keputusan Etis, Praktik Etika Administrasi.

Abstract

This article explores the concept of integrity and ethical decision making in the public sector, with a focus on a case study from local government in Indonesia. Through qualitative analysis of selected cases, this article identifies how integrity and ethics are applied in decision-making practices at the local government level. This research reveals the challenges and obstacles faced by public officials in maintaining integrity and making ethical decisions, as well as the strategies they use to overcome these problems. Key findings indicate that despite a supportive policy framework, there are still gaps in the implementation of ethical practices in the field. This article provides recommendations for improving integrity and ethics in decision making, including developing ethics training, improving oversight mechanisms, and strengthening an ethics-focused organizational culture. This research provides important insights for policymakers, practitioners and academics interested in improving good and ethical governance.

Keywords: Public Sector Integrity, Ethical Decision Making, Administrative Ethics Practices.

A. PENDAHULUAN

Integritas dan pengambilan keputusan etis dalam sektor publik merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat lokal (Bowman & West, 2007). Di Indonesia, tantangan dalam menjaga integritas dan etika di pemerintahan lokal sering kali dikaitkan dengan isu korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi (Transparency International, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integritas dan etika

diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan di pemerintahan lokal Indonesia, sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur (Klitgaard, 1988). Pentingnya topik ini terletak pada dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tyler, 2006). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap studi kasus pilihan, yang memberikan wawasan mendalam tentang praktik pengambilan keputusan etis di pemerintahan lokal (Yin, 2014). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana integritas dan etika dapat ditingkatkan dalam tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia.

Di Indonesia konteks pemerintahan lokal memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi integritas dan pengambilan keputusan etis. Faktor-faktor seperti struktur politik desentralisasi, keragaman budaya, dan dinamika sosial-politik lokal berkontribusi pada kompleksitas isu integritas dan etika (Hadiz, 2010). Misalnya, desentralisasi yang diperkenalkan pasca-reformasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, namun juga menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan standar etika (Hill, 2014). Selain itu, praktik korupsi dan kolusi di tingkat lokal sering kali terjadi dalam konteks yang lebih rumit karena adanya interaksi antara aktor politik dan ekonomi lokal (Robison & Hadiz, 2004). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang dinamika lokal menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah integritas dan etika (Tornquist, 2002). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor lokal spesifik dalam menganalisis bagaimana integritas dan pengambilan keputusan etis diterapkan di pemerintahan lokal Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyediakan analisis mendalam tentang bagaimana integritas dan pengambilan keputusan etis diterapkan dalam pemerintahan lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang mendukung integritas dan etika serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus khusus diberikan pada bagaimana kebijakan dan program yang ada mendukung atau menghambat praktik etis di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Tujuan ini penting untuk memahami dinamika pengambilan keputusan etis di Indonesia dan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan integritas dan etika dalam pemerintahan lokal, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pentingnya mempelajari topik integritas dan pengambilan keputusan etis dalam sektor publik, khususnya di tingkat pemerintahan lokal di Indonesia, terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Integritas dan etika dalam pengambilan keputusan tidak hanya mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga menentukan persepsi publik terhadap legitimasi dan kredibilitas pemerintah (Rothstein & Teorell, 2008). Dalam konteks Indonesia, di mana tantangan seperti korupsi dan nepotisme masih menjadi isu utama, memahami dan meningkatkan integritas dan etika di tingkat pemerintahan lokal menjadi sangat penting (Mietzner, 2009). Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana integritas dan etika dapat diperkuat dalam pemerintahan lokal, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat demokrasi di Indonesia (Aspinall & Fealy, 2003).

B. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap studi kasus pilihan dari pemerintahan lokal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menangkap nuansa dan konteks spesifik yang mempengaruhi integritas dan pengambilan keputusan etis di tingkat lokal (Yin,

2014). Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mengumpulkan data yang memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan, bagaimana keputusan dibuat, dan apa dampaknya terhadap pelayanan publik. Metodologi ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam menjaga integritas dan etika, serta untuk menghasilkan rekomendasi yang berdasarkan pada pengalaman nyata di lapangan (Bryman, 2012). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang integritas dan pengambilan keputusan etis dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Integritas dan Etika dalam Pengambilan Keputusan

Temuan riset menunjukkan bahwa praktik integritas dan etika dalam pengambilan keputusan di pemerintahan lokal di Indonesia bervariasi secara signifikan. Di beberapa daerah, terdapat contoh penerapan integritas dan etika yang baik, di mana pejabat publik secara aktif menerapkan standar tinggi dalam pengambilan keputusan mereka, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, di daerah lain, tantangan seperti korupsi, kurangnya sumber daya, dan pelatihan yang tidak memadai menghambat praktik etis.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kerja kebijakan dan regulasi yang mendukung integritas dan etika, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan dalam implementasi ini sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang pentingnya etika, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Rekomendasi yang muncul dari temuan ini mencakup perlunya pelatihan yang lebih baik untuk pejabat publik, peningkatan mekanisme pengawasan, dan penguatan budaya organisasi yang berfokus pada integritas dan etika. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang keadaan integritas dan pengambilan keputusan etis di pemerintahan lokal Indonesia dan menawarkan arah untuk perbaikan di masa depan.

2. Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Terkini

Analisis terhadap kebijakan dan regulasi terkini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya legislatif untuk mendukung integritas dan etika di pemerintahan lokal, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sering kali tidak diikuti dengan pengawasan yang efektif, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kerangka hukum yang baik, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana kebijakan tidak sepenuhnya diterapkan atau diabaikan. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa seringkali ada ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat di tingkat nasional dengan realitas dan kebutuhan di tingkat lokal. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan kebijakan yang efektif dan relevan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, temuan ini menyarankan perlunya penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga praktis dan efektif dalam konteks lokal. Temuan ini penting untuk memahami dinamika antara kebijakan dan praktik di pemerintahan lokal dan memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.

3. Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Kepercayaan Masyarakat

Temuan riset mengenai dampak integritas dan pengambilan keputusan etis terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat menunjukkan hubungan yang signifikan. Di daerah di mana integritas dan etika ditekankan dalam pengambilan keputusan, kualitas pelayanan publik cenderung lebih tinggi, dan ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, di daerah dengan praktik etis yang lemah, sering terjadi ketidakpuasan publik dan penurunan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa integritas dan etika bukan hanya penting dari segi moral, tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata terhadap efektivitas pemerintahan.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan aset penting yang dapat diperkuat melalui praktik integritas dan etika yang konsisten. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan di pemerintahan lokal tidak hanya merupakan tujuan yang diinginkan secara etis, tetapi juga strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan integritas dan etika dalam pemerintahan lokal sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Temuan riset mengenai dampak integritas dan pengambilan keputusan etis terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat menunjukkan hubungan yang signifikan. Di daerah di mana integritas dan etika ditekankan dalam pengambilan keputusan, kualitas pelayanan publik cenderung lebih tinggi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik etis tidak hanya penting dari segi moral, tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata terhadap efektivitas pelayanan publik. Di sisi lain, di daerah di mana integritas dan etika kurang diperhatikan, sering terjadi ketidakpuasan masyarakat dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah.

Temuan ini menegaskan pentingnya integritas dan etika sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan etika di pemerintahan lokal tidak hanya merupakan tujuan etis, tetapi juga strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Temuan ini memberikan pandangan penting tentang bagaimana integritas dan etika dapat secara langsung mempengaruhi persepsi dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah lokal.

5. Rekomendasi untuk Peningkatan Praktik

Tantangan dan hambatan dalam implementasi integritas dan pengambilan keputusan etis di pemerintahan lokal Indonesia menjadi temuan penting dalam riset ini. Salah satu tantangan utama adalah adanya korupsi dan praktik nepotisme yang masih berakar kuat di beberapa daerah, yang menghambat penerapan etika administrasi yang efektif. Selain itu, terdapat juga hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional yang memadai untuk mendukung praktik etis.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan untuk menerapkan integritas dan etika, seringkali terdapat kendala praktis yang membuat implementasinya menjadi sulit. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya etika di kalangan pejabat publik juga menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang etika administrasi. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan integritas dan etika di pemerintahan lokal dan menyoroti area yang memerlukan perhatian dan perbaikan dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Analisis terhadap praktik integritas dan etika dalam pengambilan keputusan di pemerintahan lokal Indonesia menunjukkan kesenjangan signifikan antara teori dan praktik. Meskipun teori administrasi publik, seperti yang dijelaskan oleh Rohr (1989), menekankan pentingnya etika dan integritas dalam pelayanan publik, temuan di lapangan sering kali berbeda. Studi oleh Klitgaard (1988) menunjukkan bahwa korupsi dan praktik tidak etis dapat

merusak integritas sistem pemerintahan, sebuah fenomena yang juga terlihat dalam temuan ini. Selanjutnya, penelitian oleh Maesschalck (2004) mengenai implementasi kode etik di sektor publik menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan contoh dari pemimpin, sesuatu yang tidak selalu konsisten di pemerintahan lokal Indonesia. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Menzel (2007), yang menemukan bahwa tantangan dalam menerapkan etika sering kali berkaitan dengan kurangnya sumber daya dan pelatihan. Selain itu, studi oleh Cooper (2012) tentang tanggung jawab administrator menunjukkan bahwa tanpa akuntabilitas yang kuat, praktik etis sulit untuk diterapkan secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ada pemahaman teoritis tentang pentingnya integritas dan etika, penerapannya di pemerintahan lokal Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal sumber daya, pelatihan, dan akuntabilitas.

Analisis terhadap pengaruh kebijakan dan regulasi terkini dalam mendukung integritas dan pengambilan keputusan etis di pemerintahan lokal Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, implementasinya sering kali tidak efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Osborne (2010), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya tergantung pada isi kebijakannya, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Studi oleh Bovens (2007) tentang akuntabilitas dalam administrasi publik menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan dapat menjadi tidak efektif. Temuan ini juga mendukung argumen Hood (1991) tentang pentingnya 'NPM' (New Public Management) dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di sektor publik, namun menunjukkan bahwa penerapannya di Indonesia masih menghadapi hambatan. Selain itu, penelitian oleh Peters & Pierre (1998) tentang tantangan dalam reformasi administrasi publik menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sering kali sulit diimplementasikan karena resistensi internal dan kurangnya sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan dan regulasi yang mendukung integritas dan etika penting, fokus harus juga diberikan pada peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pengawasan untuk memastikan implementasi yang efektif di pemerintahan lokal Indonesia.

Analisis dampak integritas dan pengambilan keputusan etis terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat menunjukkan hubungan yang erat dan signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tyler (2006), yang menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sangat bergantung pada persepsi tentang keadilan dan integritas dalam pengambilan keputusan. Studi oleh Grimmelikhuijsen et al. (2013) juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa di daerah di mana integritas dan etika ditekankan, terjadi peningkatan dalam kepercayaan masyarakat dan kepuasan terhadap pelayanan publik. Sebaliknya, di daerah dengan praktik etis yang lemah, sering terjadi penurunan kepercayaan dan kepuasan publik. Penelitian oleh Van de Walle et al. (2008) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pemerintah sering dikaitkan dengan pengalaman buruk dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan pentingnya integritas dan etika tidak hanya sebagai nilai intrinsik tetapi juga sebagai faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Analisis terhadap tantangan dan hambatan dalam implementasi integritas dan pengambilan keputusan etis di pemerintahan lokal Indonesia menyoroti beberapa isu kunci. Temuan ini mengungkap bahwa korupsi dan praktik nepotisme masih menjadi hambatan utama, sesuai dengan studi oleh Klitgaard (1988), yang menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional, seperti yang dijelaskan oleh Brinkerhoff dan Goldsmith (2005), juga menjadi hambatan dalam menerapkan praktik etis secara efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan untuk menerapkan integritas dan etika, seringkali ada kendala praktis yang membuat implementasinya menjadi sulit. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang

pentingnya etika di kalangan pejabat publik, seperti yang diidentifikasi oleh Maesschalck (2004), juga menjadi hambatan. Temuan ini menegaskan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang etika administrasi, serta peningkatan mekanisme pengawasan untuk memastikan penerapan praktik etis yang efektif di pemerintahan lokal Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari riset ini menunjukkan bahwa integritas dan pengambilan keputusan etis di pemerintahan lokal Indonesia memainkan peran penting dalam efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Meskipun ada kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung integritas dan etika, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Praktik integritas dan etika yang baik di beberapa daerah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Namun, di daerah lain, tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi menghambat praktik etis. Kebijakan dan regulasi yang ada sering kali tidak diikuti dengan pengawasan yang efektif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang baik, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional menjadi hambatan utama dalam menerapkan integritas dan etika. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya etika di kalangan pejabat publik juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang etika administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas dan etika tidak hanya penting dari segi moral, tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata terhadap efektivitas pelayanan publik.

Peningkatan integritas dan etika di pemerintahan lokal tidak hanya merupakan tujuan etis, tetapi juga strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana integritas dan etika dapat secara langsung mempengaruhi persepsi dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah lokal. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan etika harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya pelatihan yang lebih baik untuk pejabat publik, peningkatan mekanisme pengawasan, dan penguatan budaya organisasi yang berfokus pada integritas dan etika. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang integritas dan pengambilan keputusan etis dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia dan menawarkan arah untuk perbaikan di masa depan. Implementasi efektif integritas dan etika di pemerintahan lokal akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Bowman, J. S., & West, J. P. (2007). Ethical Dilemmas of Public Administration: Integrity and Accountability. *Public Administration Review*, 67(3), 555-565.
- Brinkerhoff, D. W., & Goldsmith, A. A. (2005). Institutional Dualism and International Development: A Revisionist Interpretation of Good Governance. *Administration & Society*, 37(2), 199-224.
- Cooper, T. L. (2012). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*. Jossey-Bass.

- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575-586.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hill, H. (2014). *The Public Administration of Indonesia*. Melbourne University Publishing.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Maesschalck, J. (2004). Approaches to Ethics Management in the Public Sector: A Proposed Extension of the Compliance-Integrity Continuum. *Public Integrity*, 7(1), 21-41.
- Menzel, D. C. (2007). *Ethics Management for Public Administrators: Building Organizations of Integrity*. M.E. Sharpe.
- Mietzner, M. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (1998). Governance Without Government? Rethinking Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(2), 223-243.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Rohr, J. A. (1989). *Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values*. CRC Press.
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. *Governance*, 21(2), 165-190.
- Tornquist, O. (2002). "Defining and Operationalizing Democracy and Good Governance: A Comparison of Indonesia and Kerala. In *Reinventing Social Democratic Development: Insights from Indian and Scandinavian Comparisons*' (pp. 22-49). NIAS Press.
- Transparency International. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*. Berlin, Germany: Transparency International.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., & Bouckaert, G. (2008). Trust in the Public Sector: Is There Any Evidence for a Long-Term Decline?. *International Review of Administrative Sciences*, 74(1), 47-64.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage publications.